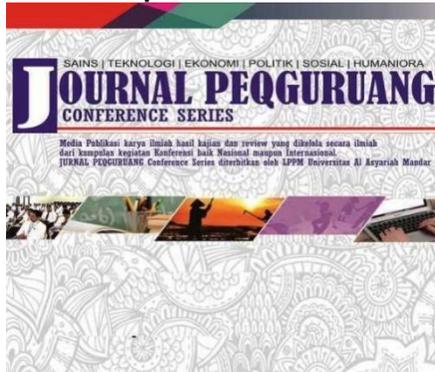


Graphical abstract



IMPLEMENTASI PROGRAM PAMSIMAS (PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT) DI DESA KUAJANG KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR

¹*Rudi, ²Abdul Khalik, ³Muhammad Massyat.

¹Universitas Al Asyariah Mandar.

*Corresponding author

rudijhi350@gmail.com

Khalikmandar@gmail.com

achatwibowo@gmail.com

Abstract

The formulation of the problem in this research is how the implementation of the Pamsimas program in Kuajang Village and what factors support and hinder the implementation of Pamsimas in Kuajang Village, Binuang District.

The method used is a type of research that is qualitative research, the location and time of the research is carried out in Kuajang village, Binuang sub-district, Polewali mandar district, Research Instruments, namely qualitative methods are the main instrument in an effort to collect data and make observation guidelines and interview guidelines, Research Informants as a source of information, Data collection techniques are interviews, observation, documentation. Data analysis techniques are data collection, data reduction, data presentation and then draw conclusions.

Second, the implementation of the community-based Pamsimas program is expected to play an active role because it is community-based, meaning that the community has a major role in the Pamsimas program from planning to implementation. responsibility (2) The supporting factor is communication which will determine how the sustainability of the Pamsimas program in the future, resources, community attitudes towards the PAMSIMAS program are also very influential on the success of Pamsimas, the bureaucratic structure of Pamsimas implementers is professional.

Keywords: *Implementantion Program,Pamsimas*

Abstrak

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi Program Pamsimas di Desa Kuajang dan faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat Implementasi Pamsimas di Desa Kuajang Kecamatan Binuang .Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Pamsimas di Desa Kuajang Adapun metode yang digunakan Jenis Penelitian yaitu Penelitian Kualitatif lokasi dan waktu penelitian dilakukan di desa kuajang kecamatan Binuang kabupaten polewali mandar Instrumen Penelitian yaitu metode kualitatif merupakan instrumen yang utama dalam upaya mengumpulkan data dan membuat pedoman Observasi dan pedoman wawancara Informan Penelitian sebagai sumber informasi Teknik pengumpulan data yaitu wawancara ,observasi,dokumentasi,Teknik analisis data yaitu pengumpulan data reduksi data penyajian data kemudian menarik kesimpulan kedua implementasi Program Pamsimas berbasis masyarakat dan masyarakat sendiri diharapkan sangat berperan aktif karena berbasis masyarakat yang berarti masyarakat yang memiliki peran besar dalam program pamsimas mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan.faktor pendukung dan faktor Penghambat yaitu:(1) Faktor Penghambat kurangnya kesadaran masyarakat akan tugas dan tanggung jawabnya (2) Faktor Pendukung adalah komunikasi sangat menentukan bagaimana keberlangsungan program pamsimas kedepan sumber daya sikap masyarakat kepada program Pamsimas juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pamsimas struktur birokrasi pelaksana pamsimas telah professional.

Kata kunci: *Implementasi,Program,Pamsimas*

Article history

DOI: [10.35329/jp.v5i2.3515](https://doi.org/10.35329/jp.v5i2.3515)

Received : 04/08/2022 | Received in revised form :04/08/2022 | Accepted :..... 2020

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi yang dijalankan oleh dan untuk warga negaranya. Dimana segala sesuatu kebijakan-kebijakan pemerintah harus berdampak kepada masyarakat dan kebijakan selalu harus mementingkan kepentingan rakyat dan kebijakan pembangunan bersifat adil kepada masyarakat. Namun, peran pemerintah pusat lebih besar dalam memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembangunan yang sangat membutuhkan pembangunan yang komprehensif dimulai dari pembangunan sektor-sektor kecil pembangunan desa. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menutup kesenjangan pembangunan saat ini, sehingga harus segera ditutup untuk mengatasi ketertinggalan pembangunan di suatu daerah. dengan

Beberapa persoalan yang muncul di desa malah semakin parah, khususnya pembangunan kabupaten atau kota (Bappenas).

Pemerintah daerah kini diwajibkan menyediakan layanan air minum dan sanitasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang urusan wajib pemerintah daerah yang berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM-PAMS) yang telah ditetapkan pemerintah untuk mendukung kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang memenuhi SPM tersebut.

Program pamsimas merupakan salah satu pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama dalam menurunkan angka penyakit diare dan penyakit lainnya ditularkan melalui air dan lingkungan ruang lingkup kegiatan program pamsimas III Desa Kuajang di Kabupaten Polewali Mandar sebagai salah satu desa sasaran program pamsimas desa kuajang adalah merupakan salah satu desa di Kabupaten Polewali Mandar yang daerahnya dengan tingkat layanan untuk akses air minum terbilang masih minim berdasarkan hasil survey dilapangan oleh pengelola pamsimas dan memaan bahwa desa ini merupakan desa yang sangat membutuhkan air minum yang aman dan layak.

Program pamsimas di desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar desa tersebut terdiri dari 5 dusun yaitu dusun lemo baru lemo tua sarampu 1 saranpu 2 serta pakkandoang dimana ada 2 dusun yang menjadi sasaran program di tahun 2021 yaitu dusun lemo baru dan saranpu 2 letak wilayah desa kuajang berada di sekitar jalan poros Trans Sulawesi dan 5 km dari dari ibu kota Polewali Mandar sebagian besar penduduk desa Kuajang kecamatan Binuang bermata pencharian bertani dan berkebun

Program Pamsimas sendiri masuk di desa Kuajang pada tahun 2018 serta reguler di tahun 2019 sehingga penulis tertarik untuk meneliti program pamsimas di desa Kuajang dengan melakukan observasi awal sebanyak 3 kali dilapangan dan penulis menemukan beberapa

masalah yang terjadi dilapangan khususnya masalah yang terjadi di masyarakat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dengan program pamsimas di desa kuajang yang dimana pamsimas itu sendiri difokuskan ke masyarakat sebagai pihak pelaksana pengambilan keputusan serta penerima manfaat (Berbasis Masyarakat) masyarakat beranggapan bahwa pamsimas merupakan program murni pemerintah yang dimana proses perencanaan pelaksanaan dan evaluasi masyarakat tidak dilibatkan padahal yang sebenarnya Program tersebut adalah program PAMSIMAS. yang berbasis masyarakat.

Berdasarkan beberapa masalah yang telah ditemukan diatas maka peneliti tertarik mengangkat judul "Implementasi Program Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) di Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian terdahulu penulis mengambil referensi dari skripsi yang berjudul Implementasi Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lebak oleh Rachmawati dwi maharani program studi ilmu administrasi negara di fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas sultan ageng tirtayasa 2014 serang rangkas belitung hasil dari penelitian ini adalah dalam implementasinya belum berjalan dengan baik kurangnya profesional kerja kurangnya keikutsertaan masyarakat terhadap program tersebut sedangkan penulis dapatkan dilokasi penelitian di Desa Kusjang Kecamatan binuang kabupaten polewali mandar

Skripsi yang berjudul Analisa Pelaksanaan program air minum dan sanitasi berbasis masyarakat PAMSIMAS II oleh Selin Nur Riski, Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan, FISIP Universitas Diponegoro Kabupaten Semarang, Desa Timpik, dan Kecamatan Susukan hasil penelitian dari penelitian terdahulu yaitu kurangnya sosialisasi oleh pelaksana pamsimas itu sendiri kurangnya profesional itu sendiri sedangkan penulis sendiri itu sebaliknya desa yang di tempati penulis di desa kuajang kecamatan binuang kabupaten polewali mandar telah profesional.

Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Purwosari, Kabupaten Blora," Andry Kristanto hasil penelitian yaitu pasokan air baku dan sumber air yang langka, sanitasi, dan praktik kebersihan sedangkan penulis sendiri sebaliknya di desa kuajang kecamatan binuang kabupaten polewali mandar itu sebaliknya sumber air di desa kuajang itu airnya telah meimpah dan kebiasaan sehat dan perlindungan lingkungan. kebiasaan sehat dan perlindungan lingkungan.

Di desa kuajang sendiri program pamsimas masuk pada tahun 2018 dan reguler pada tahun 2019 atau pamsimas di desa kuajang tahap III tepatnya di Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yang memiliki 5 dusun yaitu: Dusun Lemo tua, Sarampu 2, dan Sarampu 2 yang memiliki kendala tidak lancar airnya adapun beberapa masalah yang didapatkan peneliti yang telah melakukan observasi awal adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya keterlibatan langsung oleh masyarakat di desa kuajang dan kesadaran masyarakat akan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Penempatan penyimpangan Bak Air/PMA kurang strategis dari permukiman masyarakat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis ternyata penulis keliru mengenai mengapa penempatan bak air kurang strategis di permukiman masyarakat atau jarak PMA dengan rumah masyarakat itu ternyata ketika penulis melakukan penelitian alasannya karena PMA tergantung lokasi tempat mata Air berada.

Berdasarkan beberapa masalah yang telah di temukan diatas maka peneliti tertarik mengangkat judul “Implementasi Program Pamsimas(Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) Di Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar”

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program Pamsimas di Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar
2. Faktor Penghambat Pamsimas di Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

c. Tujuan Penelitian

Penulis berusaha untuk: Berdasarkan rumusan masalah yang disajikan di atas

1. untuk mengetahui implementasi tugas dan fungsi pamsimas dan bagaimana implementasi pamsimas dilapangan
2. mengetahui tantangan yang dihadapi PAMSIMAS sendiri dalam penerapannya.

3. TINJAUAN PUSTAKA

1.Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Pengertian implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna .Menurut (Asep Saepulloh , Mohammad Adeyadi, 2019) implementasi adalah bermuara pada Implementasi bukan hanya kegiatan; itu adalah kegiatan yang direncanakan dengan tujuan tertentu dalam pikiran. Bisa juga merujuk pada adanya mekanisme sistem.

Menurut (Rom Ubaidillah Muhammad , Sukirno, 2019) implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang telah dilakukan Ketika perencanaan dianggap selesai, kelompok sasaran biasanya diinformasikan oleh pelaksana kebijakan implementasi.

(Moh. Muafi.Bin Thohir , Syamsul H2di HM, 2020)berpendapat implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan birokrasi yang cukup

efektif untuk membuktikan bahwa implementasi adalah kegiatan yang direncanakan dan bukan sekedar aktifitas dan dilakukan secara sungguh–sungguh berdasarkan acuan norma –norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan–tujuan kebijakan atau program–program .

Jika suatu pelayanan publik mempunyai factor penghambat maka factor pendukung juga harus ikut serta didalamnya. Seperti yang telah di bahas pada bab sebelumnya faktor pendukung yang mempengaruhi Implementasi kebijakan pelayanan publik di kelurahan lantora yaitu adanya factor kesadaran, factor aturan, faktor organisasi dan faktor pendapatan

Kita masing-masing pegawai perlu disadarkan akan hal ini, namun khusus dalam hal ini pegawai kantor lantora kelurahan harus memahami bahwa dalam menangani pengaduan masyarakat sebaiknya mereka sebagai staf menjadi orang yang cepat datang ke kantor kelurahan daripada sebaliknya. Berdasarkan beberapa wawancara di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa meskipun terdapat beberapa faktor yang belum terlaksana dengan baik, namun kinerja pegawai tersebut didukung oleh faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan publik kantor kecamatan Lantora. berjalan dengan baik dan memenuhi tujuan dari organisasinya (N., Hannan, M,2020)

2.Model Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Implementasi kebijakan, jika dilihat secara luas, adalah fase proses kebijakan yang terjadi sesaat setelah undang-undang disahkan, dimana (Budi, 2012) sebagai aktor, prosedur organisasi, dan strategi berkumpul untuk menjalankan kebijakan dalam upaya mencapai tujuan. tujuan tertentu. tujuan dari suatu kebijakan atau program.

Model George Edward III untuk melaksanakan kebijakan

.Komunikasi

Implementasi yang efektif terjadi ketika pengambil Keputusan disiapkan dan tahu apa yang akan mereka lakukan. Setiap pilihan kebijakan dan aturan pelaksanaan harus dibuat mengetahui apa yang akan mereka lakukan agar segala sesuatunya berjalan dengan baik. dikomunikasikan kepada departemen personalia yang sesuai. Hal ini sangat penting bagi keberhasilan pencapaian tujuan pelaksanaan kebijakan publik. Komunikasi diperlukan untuk memberikan konsistensi dalam pelaksanaan setiap kebijakan sosial yang akan diberlakukan.

Sumber daya

Sumber daya manusia dan keuangan dalam jumlah yang cukup harus tersedia untuk mendukung setiap kebijakan. Sementara sumber daya keuangan adalah

jumlah modal investasi yang sesuai untuk suatu program atau kebijakan, sumber daya yang cukup dengan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan juga diperlukan, dan kedua faktor ini harus diperhitungkan dalam pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah karena tanpa ketergantungan. pelaksana, Kebijakan lambat dan lugas, sementara sumber daya keuangan memastikan kelangsungan hidup jangka panjang.

1. Disposisi

Kualitas terpenting yang Kejujuran, dedikasi, dan demokrasi merupakan kualitas yang dimiliki oleh pelaksana, yang sangat terkait dengan pelaksana kebijakan atau program. Program atau kebijakan yang mengedepankan kejujuran dan menginstruksikan pelaksana untuk mengikuti arahan program sebagaimana tercantum dalam pedoman (kerangka) program akan selalu bertahan dari kendala yang dihadapi oleh para pelaksana dengan komitmen dan kejujuran yang tinggi. Komitmen dan kejujuran para pelaksana juga membuatnya lebih semangat dalam menjalankan tahapan program secara konsisten. Pola pikir yang demokratis akan meningkatkan persepsi baik pelaksana dan kebijakan di antara anggota kelompok sasaran. Dengan mengadopsi pola pikir ini, resistensi masyarakat akan berkurang, dan kepercayaan dan

2. Struktur birokrasi

Struktur organisasi lembaga pelaksana dan proses yang digunakan adalah dua elemen penting dari segi sistem birokrasi ini. pelaksanaan program, yang keduanya dapat dengan mudah dipahami oleh yang tercantum dalam pedoman program/kebijakan. Hal ini menggambarkan pentingnya struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan. SOP adalah prosedur adat yang memungkinkan karyawan atau mereka yang menerapkan kebijakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari mereka sesuai dengan kualitas kejujuran, dedikasi, dan integritas yang terkait erat dengan pelaksana kebijakan atau program.

demokrasi adalah kualitas yang paling penting untuk memiliki Komitmen tinggi dan pelaksana yang dapat dipercaya akan selalu menang atas tantangan Program/kebijakan kejujuran menginstruksikan pelaksana untuk mengikuti pedoman program dan tetap pada jalur (kerangka) program. Komitmen dan kejujuran pelaksana juga meningkatkan semangatnya untuk secara konsisten menyelesaikan tahapan program. Di mata kelompok sasaran, pendekatan demokratis akan meningkatkan persepsi positif dari pelaksana dan kebijakan. Pola pikir ini akan mengurangi oposisi masyarakat dan membangun rasa percaya dan kerjasama.

Struktur organisasi organisasi pelaksana dan metode yang digunakan merupakan dua elemen penting dari sistem birokrasi ini. pelaksanaan program, yang keduanya dapat dengan mudah dipahami oleh yang

tercantum dalam pedoman program/kebijakan. Hal ini menggambarkan pentingnya struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan. Sebuah prosedur operasi standar (SOP) memungkinkan anggota staf atau pelaksana kebijakan untuk menyelesaikan kegiatan sehari-hari sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Karena akan digunakan sebagai pedoman dalam pekerjaan pelaksana, SOP yang baik memberikan kerangka kerja yang jelas dan sistematis yang mudah dipahami oleh siapa saja. Sebisanya mungkin struktur organisasi pelaksana menghindari permasalahan yang rumit, dan lamanya organisasi pelaksana

3. Program Pamsimas

Program penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat menurut Kbbi Kamus Besar Bahasa Indonesia secara Etimologi, program (Rancangan) sanitasi (Tindakan yang diambil untuk mempromosikan dan membangun kondisi yang menguntungkan di sektor kesehatan, khususnya masyarakat) berbasis masyarakat (berdasarkan pada masyarakat) jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa pamsimas adalah sesuatu rancangan pemerintah untuk menyiapkan air minum di desa-desa yang kekurangan air minum dan daerah-daerah terpencil yang kekurangan air minum dan dengan menjaga kesehatan lingkungan atau sanitasi yang ditujukan kepada masyarakat itu sendiri.

4. Perencanaan Pamsimas

Defenisi perencanaan pembangunan, perencanaan sangat dibutuhkan karena agar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, meningkatkan pembangunan daerah mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh dengan lebih menekankan keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat berbagai pelayanan sosial, serta sarana prasarana ekonomi, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender (Ni Ketut Sudianing, Ketut Agus Seputra, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, yang memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengelola rumah mereka sendiri, perencanaan PAMSIMAS sedang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air minum domestik dan kesehatan lingkungan di lokasi terpencil yang tidak memiliki akses air. sehingga dalam pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di urus oleh daerah itu sendiri di dalam masyarakat dengan adanya program pemerintah pusat yang di serahkan kepada pemerintah daerah khususnya di Desa Kuajang Kecamatan Binuang program PAMSIMAS masuk tahun 2019 di Desa Kuajang memiliki 5 dusun yaitu Dusun Lemo baru, Lemo tua, Sarampu 1, Sarampu 2, serta Pakkandoang. letak wilayah Desa Kuajang berada di Kecamatan Binuang dimana sebagian wilayahnya berada di sekitar jalan poros trans sulawesi dan 5 km dari ibu kota Polewali Mandar. sebagian besar penduduk desa kuajang bermata pencarian bertani dan berkebun. (laporan Akhir Uwai Kaili Hal 7 2021).

5. Pelaksanaan Pamsimas

Defenisi pelaksanaan, pelaksanaan di dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) sama dengan implementasi melaksanakan atau individu atau organisasi yang melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang di sepakati sebelumnya sedangkan pelaksanaan pamsimas didesa itu oleh TKK (Teknis Koordinasi Kabupaten) itu sendiri di ketuai oleh kepala bappeda setempat .yang melakukan cek lokasi desa mana saja yang memenuhi kriteria mendapatkan program pamsimas di desanya dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membenuk tim yang khusus di desa untuk ,mengelola pamsimas yang dikenal dengan nama RKM (Rencana Kerja Masyarakat) yang memiliki anggota dari tokoh masyarakat setempat kemudian selanjutnya setelah pengelolaan pamsimas oleh RKM kemudian dilanjutkan oleh BPS-PAMS untuk melanjutkan pengelolaan perbaikan pipa dan pemungutan administrasi kepada masyarakat .

2. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Studi-studi penggunaan teknik analisis kualitatif. Sugiyono (2014:2) mendefinisikannya sebagai metode untuk memperoleh data dengan maksud dan tujuan tertentu. Penelitian deskriptif kualitatif dengan metodologi survei digunakan sebagai metode penelitian dalam penelitian ini untuk menentukan tingkat implementasi. pamsimas

di desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar sejauh mana implementasi dilapangan tentang program pemerintah yaitu pamsimas di desa kuajang itu sendiri

b. Lokasi dan waktu penelitian

Di Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar bulan April-juni 2022

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut implementasi kebijakan Model ini berfokus pada empat faktor yang dipertimbangkan untuk menentukan proses implementasi kebijakan, dengan menggunakan pendekatan top-down untuk menganalisis implementasi kebijakan.

Perencanaan implementasi adalah tindakan atau tindakan tertentu dari suatu rencana yang diungkapkan di depan mata dan dilakukan biasanya setelah rencana selesai dengan sukses (menurut nurdin usman 2019) Menurut Implementasi Kebijakan, pendekatan top-down yang digunakan untuk menganalisis implementasi model kebijakan berfokus pada delapan variabel yang secara efektif menggambarkan proses kebijakan.

Hasil Penelitian dilaksanakan di Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. dengan menggunakan Teori George Edward III yang memiliki 4 indikator yaitu :

Komunikasi yang digunakan pemerintah dan pelaksana pamsimas di lapangan ini sangat efektif karena

melakukan tanya jawab sehingga masyarakat mendapatkan informasi dengan efektif

Dalam hal ini, sumber daya adalah orang-orang. di desa kuajang kecamatan binuang kabupaten polewali mandar ini telah Profesional Baharuddin selaku Ketua KPS-SPAMS sangat menyadari bagaimana, selain menggunakan sumber daya manusia, program PAMSIMAS juga akan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, dalam hal ini mata air di desa Kuajang.

Sikap masyarakat di Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar masih terdapatnya masyarakat yang berpikiran bahwa pengelolaan pamsimas itu hanya pemerintah kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang tugas dan tanggung jawab walaupun telah banyak yang sadar akan manfaat pamsimas tentang yang dimaksud berbasis masyarakat(berperan aktif dari pelaksanaan hingga pengelolaan ditujukan kepada masyarakat)

Struktur Birokrasi sesuai dengan penjelasan yang dikemukakan Oleh ibu Ira Wati selaku bendahara KSP-PAMS mengatakan bahwa desa kuajang sendiri telah 3 kali mendapatkan Program pamsimas ini menunjukkan keberhasilan dari struktur birokrasi sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti menemukan mewan benar bahwa struktur birokrasi yang teratur dan penempatan sesuai dengan kewajiban dan tujuan masing-masing komponen bahkan kepala dusun paham menjelaskan alur pamsimas itu sendiri.

Adapun Penulis artikel ini memperoleh temuan dari penelitian yang dilakukan. melalui analisa deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan seluruh data dan informasi baik melalui wawancara observasi dan studi pustaka

Pembahasan sesuai dengan Teori George Implementasi kebijakan publik yang baik akan ditentukan oleh komunikasi Edward III, dengan tujuan yang menjadi faktor penentunya. ketika pengambil keputusan yakin dengan rencana mereka dan dapat mengomunikasikan setiap pilihan kebijakan dan penerapan peraturan kepada staf yang tepat. Agar pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan lebih konsisten dalam menjalankan segala kebijakan yang akan diambil di masyarakat, diperlukan komunikasi.

berdasarkan defenisi umum diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa komunikasi pemerintah kepada masyarakat mengenai program pamsimas yang tim yang telah dibentuk oleh pemerintah khususnya di Bappeda/Balitbangreng(mitra) sebagai tim fasilitator nantinya di desa-desa yang mendapatkan program pamsimas melakukan sosialisasi dimasyarakat tentang pamsimas pembentukan Tim RKM yang telah ditentukan oleh masyarakat pembentukan kelompok Keswadayaan Masyarakat(KKM Uwai Kaili) Pelatihan KP-SPAMS Pelatihan Kesehatan untuk petugas sanitasi pamsimas Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti telah menemukan dilapangan bahwa berbagai wawancara yang dilakukan peneliti mengungkapkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah sendiri berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang dilakukan.

Sumber daya, secara khusus menekankan perlunya sumber daya yang tepat, baik keuangan maupun manusia untuk mendukung kebijakan apa pun. Menambahkan lebih banyak sumber daya tidak akan membantu jika mereka tidak memadai atau tidak kompeten di bidangnya; Anda juga perlu memiliki sumber daya yang cukup dengan keterampilan dan kemampuan.

yang di perluhkan sedangkan sumber daya Investasi keuangan diperlukan untuk program atau kebijakan pemerintah karena tanpa ketergantungan pelaksana kebijakan, program atau kebijakan akan berjalan lambat dan sederhana. Sumber daya keuangan juga menjamin keberlanjutan program atau kebijakan karena tanpa dukungan keuangan yang memadai, program tidak akan berjalan secara efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasarannya. berdasarkan definisi umum diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa sumber daya yang dimiliki sangat strategis untuk program pamsimas karena terpenuhinya mata Air yang nantinya akan menjadi sumber utama dalam pengaliran air kepada masyarakat sumber daya alam di desa kuajang khususnya Air sudah mendukung berjalannya dengan baik program pamsimas sesuai dengan yang dilakukan peneliti untuk mengetahui bagaimana sebenarnya sumber air pamsimas di desa kuajang sendiri berdasarkan temuan wawancara peneliti kepada petugas pamsimas yaitu Baharuddin ketua KSP-PAMS yang sebelumnya pernah menjadi ketua RKM Pamsimas sesuai dengan keterangan baharuddin mengatakan bahwa sumber air di desa kuajang sendiri ini sangat terpenuhi dan melimpah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Kuajang Ciri terpenting dalam sikap yang dimiliki oleh pelaksana adalah kejujuran, komitmen, dan demokrasi. Sikap adalah menampilkan sifat-sifat yang berhubungan langsung dengan orang yang melaksanakan suatu kebijakan atau program. Pelaksana yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan selalu menang di antara tantangan integritas program, memotivasi pelaksana untuk terus bergerak di jalur program. Komitmen dan persyaratan pelaksanaan program kini lebih jelas berkat dituangkan dalam sebuah dokumen (framework). Efektivitas program akan meningkat jika dilaksanakan secara konsisten.

Berdasarkan definisi umum diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sikap desa kuajang ada yang meolak pada awalnya dan terdapat juga yang menerima sesuai dengan penjelasan kepala dusun sarampu 1 yaitu atas nama Rahim

Dalam mengimplementasikan kebijakan, organisasi birokrasi menjadi sangat penting. Proses dan struktur organisasi dari organisasi pelaksana itu sendiri merupakan dua komponen penting dari ciri struktur birokrasi ini. Biasanya, rencana untuk melaksanakan program telah dibuat. Karena berfungsi sebagai panduan untuk menempatkan struktur organisasi, SOP yang baik memiliki kerangka kerja yang sederhana, sistematis, dan mudah dipahami oleh siapa saja. Pelaksana program harus dapat memastikan bahwa pilihan dibuat dengan cepat jika terjadi keadaan luar biasa.

Berdasarkan definisi umum diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa struktur birokrasi dalam

pelaksanaan kebijakan juga mempunyai pengaruh penting birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan birokrasi ini baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan moderen struktur birokrasi yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya struktur birokrasi pemerintah tetapi maupun swasta.

Struktur birokrasi yang terdapat di desa kuajang sudah baik ini terbukti dengan keterlibatan kepala dusun dalam program pamsimas kepala desa serta aparat-aparat desa yang lainnya serta sangat mendukung keberlangsungan dari program pamsimas tugas yang jelas bagian ini bagianya sebagai yang menarik iuran di masyarakat di masyarakat dan yang ini tugasnya untuk perbaikan pipa ini tugasnya untuk sosialisasi yang terjadi dilapangan dengan mudah diketahui permasalahannya karena terdapat pembagian tugas yang jelas dan terorganisir

4. SIMPULAN

Bahwa dari 4 indikator yaitu komunikasi sikap sumber daya strukut birokrasi komunikasi yang ditemukan penulis dilapangan bahwa komunikasi yang terjadi itu sangat efektif dari pelaksana pamsimas yaitu fasilitator dan KP-SPAMS dengan masyarakat berjalan dengan baik serta penyampaian informasi yang sederhana dan mudah dimengerti sumber daya manusia di desa kuajang itu profesional mengetahui bagaimana mengelola pamsimas dengan baik dan sumber daya alamnya yang melimpah

Sikap masyarakat di desa kuajang masih terdapat masyarakat kurang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya dalam program pamsimas karena program pamsimas diharapkan masyarakat berperan besar karena pamsimas merupakan berbasis masyarakat struktur birokrasi dalam pengelolaan pamsimas di desa kuajang juga baik karena telah melakukan pembagian tugas kerja dengan jelas sehingga memudahkan masyarakat mencari informasi pembayaran iuran pamsimas di bagian ini jadi masyarakat sangat terbantu

Berdasarkan peneliti yang dilakukan penulis dari ke 4 indikator hnaya 1 indikator yang kuran berhasil yaitu indikator sikap atau kesadaran masyarakat tentang program pamsimas berbasis masyarakat sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa program pamsimas berjalan cukup baik di desa kuajang kecamatan binuang

Saran perlu dilakukan sosialisasi lebih banyak lagi kepada masyarakat tentang bagaimana sebenarnya yang dimaksud berbasis masyarakat sehingga masyarakat paham akan tugas dan tanggung jawabnya dalam program pamsimas pemerintah dan masyarakat harus selalu bergotong royong membangun desa kedepan yang lebih baik menjaga sarana dan prasarana dan pemenuhan kebutuhan air yang memadai dan masyarakat sebagai penerima manfaat

DAFTAR PUSTAKA

Winarno, Budi, 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta : PT Pustaka LP3ES Indonesia

Dalam Buku Tangkilisan . 2003 .*Implementasi Kebijakan Publik* Edward, George III .1980 .*Implementing Public Policy* Edward, George III

KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V

Sugiyono, 2014. *Metode penelitian Kualitatif* Alfabeta Bandung.

Asep Saepulloh, Mohammad Adeyadi. (2019). *Jurnal Manajemen Teknik Informatika*, 03, 102-110.

Moh. Muafi, Bin Thohir, Syamsul Hadi HM. (2020). *Implementasi Komunikasi Organisasi dalam Kegiatan Dakwah untuk Memperbaiki Diri Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Lumajang*, 6, 163-176.

Ni Ketut Sudianing, Ketut Agus Seputra. (2019). *Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah*, 11, 113-133.

Rom Ubaidillah Muhammad, Sukirno. (2019). *Implementasi Prinsip Educational Role Di Perpustakaan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Berdasarkan Standar Association Of College And Research Libraries*, 2-12.

Laporan Akhir Uwai Kaili hal 7 2021

undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah

Menurut Nurdin Usman (2019) Tentang defenisi implementasi

Nabila, N., Hannan, M., & Syaeba, M. (2020). Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik di Kelurahan Lantora Kabupaten Polewali Mandar. *Journal Peqguruang*, 2(2), 361-365.